

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Kerangka Teoritik

1. Konsep Pengorganisasian Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat.

a. Pengertian Pengorganisasian Masyarakat

Pengertian pengorganisasian berasal dari kata *Organizing* yang mempunyai arti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Adapun beberapa definisi dari pengorganisasian yang diungkapkan oleh para ahli manajemen, antara lain sebagai berikut:

1. Pengorganisasian adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menurut George R. Terry, pengorganisasian sebagai kegiatan mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggungjawab masing-masing yang bertanggung jawab untuk setiap komponen dan menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dan tepat.

3. Menurut Siagian berpendapat bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan orang-orang dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang kesemuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Pengorganisasian rakyat atau yang lebih dikenal dengan pengorganisasian masyarakat itu sendiri mengandung makna yang lebih luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat tidak hanya sekedar mengacu pada perkauman (*community*) yang khas dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (*society*) pada umumnya. Pengorganisasian lebih dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil.¹⁶

Menurut Ross Murray, pengertian pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan skala

¹⁶ Agus Afandi, Muhammad Hadi Sucipto dkk, *Modul Participatory Action Research* (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hal. 93-94.

prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong.¹⁷

b. Pengertian pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat menunjuk pada interaksi aktif antar pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial atau usaha kesejahteraan sosial.¹⁸

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.¹⁹

¹⁷ Agus Afandi, *Metodologi Participatory Action Research*...hal. 92.

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat* (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hal. 37.

¹⁹ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007), hal. 18.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective action”*.²⁰

Kegiatan pengembangan masyarakat sejatinya difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerjasama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Prinsip-prinsip Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat

Prinsip-prinsip umum pengembangan masyarakat menurut Bambang Shergi Laksmono yang dikutip oleh Adi Fahrudin adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi dua aspek yaitu perubahan fisik dan teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap.
- b. Pengembangan masyarakat bertujuan meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, tidak saja aspek makro yaitu masyarakat secara

²⁰ Ibid, hal.19.

keseluruhan, melainkan juga unsur mikro yaitu dapat dinikmati oleh segenap warga masyarakat atau paling tidak bagian terbesar warga masyarakat.

- c. Mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat. Sumber-sumber tersebut meliputi faktor fisik, manusia dan sosial. Warga masyarakat kurang peka atau tanggap terhadap sumber-sumber dan potensi yang ada disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, model, teknologi atau sistem nilai sosial budaya. Oleh karena itu pengembangan masyarakat merupakan usaha untuk mendorong dan meningkatkan meningkatkan sikap tanggap masyarakat terhadap potensi dan sumber-sumber yang ada disekitarnya.
- d. Mengutamakan kreatifitas dan inisiatif masyarakat. Hal ini berarti dalam kegiatan pengembangan masyarakat memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan sebagai objek pembangunan.
- e. Mengutamakan partisipasi masyarakat. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang muncul adalah mengerti dan sadar bahwa partisipasinya dalam pembangunan merupakan kewajiban dan haknya.

Conyers mengemukakan adanya tiga kriteria dalam pengertian komunitas. *Pertama*, konsep komunitas memiliki komponen-komponen fisik, yang menggambarkan adanya kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu dan saling mengadakan interaksi. *Kedua*, anggota-anggota

komunitas pada umumnya memiliki beberapa ciri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya identifikasi mereka sebagai suatu kelompok. *Ketiga*, suatu komunitas pada umumnya memiliki keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi .

Sementara itu Davies menyatakan bahwa elemen-elemen yang ada dalam komunitas adalah lokalitas, hubungan emosional, keterlibatan sosial, dan kepentingan bersama. Ukuran komunitas sebagai satuan kehidupan bersama yang tidak terlalu besar mengakibatkan antar anggota saling mengenal secara pribadi, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya, tetapi juga tidak terlalu kecil sehingga dapat dilakukan usaha dan aktifitas bersama secara efisien. Selanjutnya, agar tindakan bersama tersebut lebih bersandar pada partisipasi masyarakat sendiri dibutuhkan adanya kompetensi masyarakat terhadap proses pembangunan di lingkungan kehidupannya. Kompetensi yang diharapkan meliputi kompetensi pada setiap warga masyarakat secara individual maupun kompetensi komunitas sebagai keseluruhan dan kebulatan hidup bersama.

Pada tingkat warga masyarakat kompetensi terhadap proses pembangunan diwujudkan dalam dua hal yaitu tanggung jawab sosial dan kapasitas. Setiap warga masyarakat merasa bahwa proses pembangunan di lingkungan komunitas untuk meningkatkan taraf hidup, merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Di samping itu, untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial tersebut warga masyarakat perlu mempunyai

kapasitas untuk melakukannya, baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan secara mandiri.²¹

Prinsip yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pengorganisir masyarakat yang memihak pada kaum tertindas. Pada dasarnya, prinsip mengorganisir masyarakat (*community organizers*) adalah sebagai berikut:

1. Membangun etos kerja dan komitmen organizer. Etos dan komitmen seorang *community organizers* merupakan prinsip utama agar mampu bertahan menghadapi banyak tantangan dan berhasil membawa sebuah perubahan bersama masyarakat.
2. Keberpihakan dan pembebasan terhadap kaum lemah.
3. Berbaur dan terlibat (*live in*) dalam kehidupan masyarakat.
4. Belajar bersama masyarakat, merencanakan bersama dan membangun dengan apa yang masyarakat punya.
5. Kemandirian, merupakan prinsip yang dipegang baik dalam sikap politik, budaya, maupun dalam memenuhi kebutuhan dari sumber-sumber yang ada.
6. Berkelanjutan, setiap kegiatan pengorganisasian di orientasikan sebagai suatu yang terus-menerus dilakukan.
7. Keterbukaan, setiap anggota komunitas dirancang untuk mengetahui masalah-masalah yang akan dilakukan dan sedang dihadapi oleh komunitas.

²¹ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 82.

8. Partisipasi, setiap anggota komunitas memiliki peluang yang sama terhadap informasi maupun terhadap proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh komunitas.²²

3. Unsur-unsur Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

a. Proses

Merupakan serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat. Berbagai proses dapat di temukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan. Proses ini berkaitan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Kemampuan ini tumbuh dan berkembang secara bertahap sebagai akibat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalahnya.

b. Masyarakat

Masyarakat seringkali diartikan sebagai berikut:

1. Keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya: desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya.
2. Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama, misalnya dibidang: kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, keagamaan dan lain-lain.

²² Agus Afandi, Muhammad Hadi Sucipto dkk, *Modul Participatory Action Research* (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hal. 95-96.

3. Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar.
4. Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya

c. Berfungsinya Masyarakat

Untuk dapat memfungsikan masyarakat, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja, untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh keseluruhan masyarakat.
3. Melakukan upaya penyebaran rencana untuk mensukseskan rencana tersebut.

4. Tujuan-tujuan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

a. Tujuan Pengorganisasian Masyarakat

Tujuan-tujuan dari Pengorganisasian Masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat, melalui proses pengorganisasian masyarakat, rakyat akan belajar bagaimana mereka mengatasi ketidakberdayaan (*powerless*) mereka, sekaligus mengembangkan kapasitas mereka untuk memaksimalkan kemampuan mereka hadapi dengan kemampuan mereka sendiri. Dalam proses

menganalisis struktur dan lembaga-lembaga yang “menindas” mereka, masyarakat akan berkembang dari sekedar obyek yang tidak manusiawi menjadi manusia seutuhnya yang sadar akan hak-haknya dan dapat menentukan nasib mereka sendiri sehingga lebih bermartabat.

2. Membangun struktur dan organisasi masyarakat yang lebih kuat. Pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk membangun dan memelihara struktur organisasi yang paling cocok, yang dapat memberikan pelayanan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Struktur tersebut harus dapat menjamin terjadinya partisipasi yang optimal dari rakyat dan dalam waktu yang sama juga memberikan wadah untuk dapat berhubungan dengan organisasi dan sektor lainnya.
3. Meningkatkan kualitas hidup. Pengorganisasian masyarakat menjadi jalan untuk menjamin peningkatan kualitas hidup rakyat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, proses-proses mobilisasi harus bisa memberikan kesempatan kepada rakyat agar terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Untuk jangka panjang, harus dapat menciptakan iklim kondusif untuk pengembangan SDM dan solidaritas melalui distribusi antara kekuasaan dan sumber daya masyarakat dampingan yang

seimbang, sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan hak dasarnya.²³

b. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan Pengembangan masyarakat yaitu mampu merubah keadaan sebelumnya dan meningkatkan kondisi kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas bersangkutan. Pada dasarnya ada hubungan timbal balik antara pola perilaku sosial dengan kondisi lingkungan. Pola perilaku sosial dipengaruhi oleh karakteristik kualitas lingkungan dan sebaliknya pola perilakunya juga mempengaruhi karakteristik dan kualitas lingkungan.²⁴

Tujuan utama pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kondisi kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas yang bersangkutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang baru maupun yang lama di masyarakat.
- 2) Identifikasi potensi masyarakat dan sumberdaya yang dimiliki.
- 3) Merumuskan tindakan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan permasalahan.

²³ Agus Afandi, Muhammad Hadi Sucipto dkk, *Modul Participatory Action Research* (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hal. 93-94.

²⁴ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 227.

- 4) Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun guna meningkatkan kualitas hidup. Kompetensi ini menyangkut rasa ingin memperbaiki nasibnya, rasa percaya diri dan critical mass, yaitu sekelompok warga yang dapat melihat lebih jauh dan lebih luas.²⁵

5. Model-model Pengorganisasian

Adapun Model-model pengorganisasian Masyarakat yang dipergunakan dalam pengorganisasian komunitas, antara lain:

a. Model Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locallity Development Model*)

Model PML memberikan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua kalangan masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan perubahan dalam proses yang dirancang untuk mendapatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi penjurur masyarakat melalui partisipasi aktif mereka berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakasa mereka sendiri.

PML berorientasi pada “tujuan proses” (proses goal) dari pada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi

²⁵http://wiki.fasilitator-masyarakat.org/index.php?title=Pengembangan_Masyarakat, diakses pada tanggal 06 juni 2013.

kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses PML.²⁶

Struktur dan kondisi permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat ialah kurangnya aktifnya partisipasi warga masyarakat. Biasanya, masyarakat diikat oleh tradisi-tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang kurang berkehendak mengadakan perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan dari luar.

Strategi dasar yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk menciptakan semangat agar masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan, baik penataan kebijakan, perumusan kebutuhan maupun dalam pemecahan permasalahan mereka sendiri. Jadi, strateginya ialah mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat dalam pembangunan itulah yang menjadi tujuan utama proses perubahan. Apabila warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif berarti bertanda perubahan pun sudah tercapai.²⁷

²⁶ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Anggota IKAPI, 2008), hal. 135.

²⁷ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung, Humaniora Utama Press, 2010), hal. 67-68.

b. Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*)

Model PS menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substansi seperti pengangguran, permukiman kumuh, kemacetan dan sebagainya. Selain itu PS bertujuan mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali demi mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Model ini sarasanya ialah kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya melalui usaha-usaha yang terencana, terarah dan terkendali. Seorang perencana melihat bahwa masyarakat merupakan bentuk kumpulan yang terdiri atas kelompok masyarakat yang menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda atau kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama dan tertentu hingga diketahui jalan pemecahannya agar kepentingan itu dapat terwujud.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah mengumpulkan atau mengungkapkan fakta dan data mengenai sesuatu permasalahan. Kemudian mengambil tindakan rasional dan mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan. Jadi, strateginya adalah mengumpulkan dan menganalisis fakta dan data tentang permasalahan, dilanjutkan dengan

menetapkan cara terbaik dalam penyusunan program, dalam memberikan pelayanan atau dalam melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan.²⁸

c. Model Aksi Sosial (*Social Action Model*)

Model AS menekankan pada betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung dan meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, mengerakkan kelompok atau golongan-golongan masyarakat tersebut guna terlibat aktif dalam mengadakan perubahan-perubahan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadapi.

Dalam kaitannya ini, menurut Edi Suharto menjelaskan, tujuan dan sasaran utama AS adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan pada struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of resources*), dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*), masyarakat sebagai sistem klien dianggap sebagai “korban” ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, lemah karena dilemahkan, dan

²⁸ Ibid, hal. 69.

tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. AS berorientasikan pada “tujuan proses” dan “tujuan hasil”. Masyarakat diorganisasi melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan actual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokratis, pemerataan (*equality*), dan keadilan (*equity*).²⁹

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan mengadakan usaha-usaha yang lebih terorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target tertentu. Dengan kata lain, melalui tindakan-tindakan yang lebih terorganisir dan terarah, golongan-golongan tersebut mampu memperoleh kekuatan dan tujuan yang diinginkan. Tindakan-tindakan masyarakat yang terorganisir ini dapat diajukan untuk lembaga-lembaga tertentu, juga untuk seseorang atau sekelompok orang. Teknik-teknik yang digunakan adalah menggerakkan kelompok masyarakat dalam kegiatan yang terorganisir dan juga menggerakkan masyarakat dalam tindakan langsung (*direct action*) untuk memecahkan konflik-konflik atau pertentangan-pertentangan, termasuk teknik-teknik pengajuan usulan atau saran-saran dengan menggunakan kekuatan massa.³⁰

²⁹ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Anggota IKAPI, 2008), hal. 137.

³⁰ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung, Humaniora Utama Press, 2010), hal. 71.

6. Tahapan Pengorganisasian Masyarakat

Tahapan pengorganisasian diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memulai pendekatan. Mulai mendekati suatu kelompok selalu memerlukan apa yang selama ini dikenal sebagai sebagai “pintu masuk” (*entry point*) atau “kunci” yang menentukan untuk mulai membangun hubungan dengan masyarakat setempat.
- 2) Investigasi sosial (riset partisipatoris) merupakan kegiatan riset (penelitian) untuk mencari dan menggali akar persoalan secara sistematis dengan cara partisipatoris. *Organizer* terlibat dalam kehidupan komunitas langsung dan bersama-sama komunitas, menemukan beberapa masalah yang kemudian bersama anggota komunitas melakukan upaya klasifikasi untuk menentukan masalah apa yang paling kuat dan mendesak untuk diangkat.
- 3) Memfasilitasi proses, merupakan salah satu fungsi paling pokok dari seorang pengorganisir. Memfasilitasi ini dalam artian memfasilitasi proses-proses pelatihan atau pertemuan saja.
- 4) Merancang strategi. Merancang dan merumuskan strategi dalam pengorganisasian masyarakat benar-benar diarahkan untuk melakukan dan mencapai perubahan sosial yang lebih besar dan lebih luas di tengah masyarakat.
- 5) Mengerahkan aksi (tindakan). Mengorganisir aksi bersama komunitas untuk melakukan suatu aksi (tindakan) yang memungkinkan

keterlibatan (partisipasi) masyarakat sebenar-benarnya dalam penyelesaian masalah mereka sendiri.

- 6) Menata organisasi dan keberlangsungannya. Mengorganisir masyarakat juga berarti membangun dan mengembangkan satu organisasi yang didirikan, dikelola dan dikendalikan oleh masyarakat setempat sendiri.
- 7) Membangun sistem pendukung. Secara garis besar, berbagai jenis peran dan taraf kemampuan yang biasanya dibutuhkan sebagai sistem pendukung dari luar dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan berbagai bahan-bahan dan media kreatif untuk pendidikan dan pelatihan, kampanye, lobi, aksi-aksi langsung dan sebagainya.
 - b. Pengembangan kemampuan organisasi rakyat itu sendiri untuk merancang dan menyelenggarakan proses-proses pendidikan dan pelatihan warga atau anggota mereka.
 - c. Penelitian dan kajian, terutama dalam rangka penyediaan informasi sebagai kebijakan dan perkembangan di tingkat nasional dan internasional, mengenai masalah atau isu utama yang diperjuangkan oleh rakyat setempat.

7. Proses-proses Pengorganisasian Masyarakat

Proses-proses pengorganisasian

- 1) Bahwa satu kelompok masyarakat tertentu pertama kali harus mengidentifikasi adanya suatu keinginan bersama untuk melakukan sesuatu dalam rangka memecahkan masalah-masalah penting yang

mereka hadapi. Sehingga, mereka juga harus mengidentifikasi apa saja masalah-masalah penting tersebut.

- 2) Kelompok masyarakat itu mulai merencanakan suatu strategi bersama mengenai tindakan-tindakan apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana cara melakukannya
- 3) Kelompok itu kemudian mendaftarkan apa saja kemampuan yang mereka miliki, apa saja kekuatan dan kelemahan mereka dan jika perlu, apa saja keterampilan dan sumberdaya lain yang masih perlu mereka adakan.
- 4) Kelompok itu telah tiba pada tahap mulai melaksanakan semua rencana mereka sesuai dengan perkembangan keadaan yang mereka hadapi.³¹

8. Pengertian Organisasi dan Paguyuban

a. Organisasi

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah.

Adapun pengertian organisasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut James L. Gibson, John M. Ivencevich, Donnelly dalam bukunya *Organization* menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat untuk berserikat dalam mencapai

³¹ Jo Han Tan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat* (Jogyakarta: Insits Press, 2003), hal. 14-15.

suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan atau tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah.³²

- b) Menurut James D. Money menyatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu bentuk dari setiap kerja sama manusia dalam mencapai tujuan bersama (*the form of every human association for attainment of a common purpose*).
- c) Menurut P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
- d) Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.³³
- e) Menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

³² Harjiono Dydiet, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 5.

³³ Prajudi Atmosudirojo, *Dasar-Dasar Administrasi Manajemen dengan Office Management* (Jakarta, 1976), hal. 5.

b. Paguyuban

Paguyuban dalam bahasa Inggris disebut juga *community*, paguyuban juga diartikan dengan kebersamaan, keterlibatan, komunikasi, relasi yang terjadi terus menerus, sehati dan sejiwa dalam suka maupun duka untuk menghidupi dan menghadapi serta menghayati tugas, karya, dan panggilan hidup dalam mewujudkan visi dan misi paguyuban tersebut.³⁴

Kebersamaan setiap anggotanya yang selaras yang hidup dalam kebersamaan memiliki kepekaan dan bertindak saling mengasahi sehingga terbentuk suatu komunitas yang sehati dan sejiwa. Bentuk kehidupan bersama yang menghayati solidaritas, toleransi dan prinsip subsidiaritas dalam memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama, kebutuhan untuk hidup berkelompok yang berlandaskan kepercayaan yang sama.

Sedangkan paguyuban dalam bahasa Jerman disebut juga *Gemeinschaft*, diartikan sebagai persekutuan atau kebersamaan aneka ragam orang dalam batas teritori dan kategori tertentu, dengan nilai-nilai umum sebagai berikut:

- a) disemangati kebersamaan, keterlibatan, komunikasi, relasi yang terjadi terus-menerus, sehati dan sejiwa dalam suka dan duka, untuk menghidupi dan menghayati tugas, karya, dan panggilan hidup dalam mewujudkan visi-misi paguyuban tersebut.

³⁴ Donnyreston, <http://donnyreston.cm>, diakses pada tanggal 04 juni 2013.

- b) kebersamaan setiap anggotanya yang se-detak jantung, yang hidup dalam kebersamaan, memiliki kepekaan dan bertindak saling mengasihi sehingga terbentuk suatu komunitas yang sehati-sejiwa.
- c) bentuk kehidupan bersama yang menghayati solidaritas, toleransi dan prinsip subsidiaritas dalam memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. kebutuhan untuk hidup berkelompok yang berlandaskan pada kepercayaan yang satu.

Dapat dikatakan bahwa semua paguyuban adalah sebuah organisasi akan tetapi tidak semua organisasi merupakan paguyuban. Alasannya bahwa dasar dari sebuah organisasi belum tentu cinta kasih atau persaudaraan, bisa jadi hanya berdasarkan pada kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu atau hanya atas dasar kepentingan saja. Tetapi dasar paguyuban adalah rasa persaudaraan, toleransi dan prinsip saling membantu dengan memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama di mana para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, serta sehati-sejiwa.³⁵

9. Ciri-ciri Organisasi Formal dan Organisasi Informal

Organisasi formal/ Resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang/masyarakat yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya, serta

³⁵ *Mekarsaluyu.blogspot.com*, di akses pada tanggal 04 juni 2013.

memiliki kekuatan hukum. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainnya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal adalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah dan universitas-universitas.

Menurut Berelson dan Steiner sebuah organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.
- b. Hierarkhi, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.
- c. Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar

anggota adalah tidak langsung (*impersonal*), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.

- d. Lamanya (*duration*), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama dari pada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.

Organisasi informal mempunyai ciri-ciri yaitu dengan keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan.

Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder menurut Hicks:

- a. Organisasi Primer

Organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari organisasi semacam ini adalah keluarga-keluarga tertentu.

b. Organisasi Sekunder

Organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniyah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh organisasi ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya dimana harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya.

Dengan demikian, organisasi informal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Disusun secara bebas, spontan, tidak pasti dan tidak fleksibel. Keanggotaannya diperoleh secara sadar atau secara tidak sadar.
2. Kapan seorang menjadi anggota sulit ditentukan.
3. Tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan organisasi.
4. Biasanya bersifat sementara.
5. Tidak mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik.
6. Tidak mempunyai perincian yang tegas tentang tugas-tugas dari setiap anggota organisasi.
7. Hubungan-hubungan yang terjadi antara para anggota berlangsung secara pribadi (informal).³⁶

³⁶ *Boycharotz1st.blogspot.com*, diakses pada tanggal 12 juni 2013.

10. Unsur-unsur Membentuk Organisasi

Unsur-unsur dasar yang membentuk suatu organisasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan bersama yang telah ditetapkan.
2. Adanya dua orang atau lebih/ perserikatan masyarakat.
3. Adanya pembagian tugas yang-tugas yang diatur dengan hak, kewajiban, tanggung jawab.
4. Ada kehendak untuk bekerja sama dalam pencapaian tujuan, secara individu tujuan tidak dapat dicapai.³⁷

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Amanullah Husaini, yang berjudul “Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penertibannya (Study Kebijakan dan Pembinaan Pemerintah Kota dalam Melokalisir Maraknya PKL di Jalan Rungkut Surabaya), pada tahun 2009.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang peraturan tentang penertiban para PKL yang berkeliaran di pinggir jalan yang menjadi masalah dalam pemandangan kota. Di dalam penertibannya, adanya pembinaan Pemerintah Kota dalam melokalisir para PKL, namun dalam hal tersebut banyak kontra dari pihak PKL yang menentang kebijakan pemerintah.

³⁷ Indriyono Gitosudarmo, Agus Mulyono, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Yogyakarta: BPPF, 1996).

2. Skripsi yang ditulis oleh Mamfaluthy al-Fuadhil, dengan judul “Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Banda Aceh), pada tahun 2011.

Dalam skripsi ini membahas tentang pada kebijakan relokasi yang diatur oleh pemerintah tersebut yang berdampak bagi PKL dan lingkungan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Nizar Muzaqqi, dengan judul “Model Paguyuban Wahana Karya Aneka Boga (Wakanebo) dalam Pengorganisasian Pedagang Kaki Lima (PKL) Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Surabaya, pada tahun 2012.

Dalam skripsi ini membahas tentang pada model paguyuban “wanakebo” di kelurahan Barata Jaya kecamatan Gubeng Surabaya.